BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh seorang mayit yang akan dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Dalam Kompilasi Hukum Islam¹ pasal 171 harta peninggalan dibedakan dengan harta warisan. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, sedangkan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya penyelenggaraan pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Ketentuan pembagian harta waris sangatlah penting, karena Allah telah mensyari'atkan dalam alqur'an surat al-Nisa: 11, 12, dan 176 agar tidak terjadi perselisihan antar ahli waris. Dalam surat al-Nisa: 11 dan 12 menjelaskan tentang bagian ahli waris secara rinci dan jelas. Selain itu dalam surat al-Nisa: 13 menerangkan porsi warisan tersebut adalah ketentuan Allah Swt. Dan dalam surat al-Nisa: 14, hukum-hukum tersebut merupakan ketentuan Allah Swt. Dengan demikian hukum melaksanakan pembagian harta waris adalah mengharuskan dibagikan kepada hak yang diwarisi sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an.

Penetapan dan ketentuan pembagian waris yang telah tercantum dalam al-Qur'an tidak boleh ditolak oleh ahli waris yang menerimanya, sebelum

¹Tim Redaksi nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, CV Nuansa Aulia, 2012, cet.3 hal.51

pembagian harta waris itu dilakukan. Setelah pembagian itu dilakukan menurut al-Qur'an dan ahli waris mengetahui bagiannya, dalam proses pembagiannya ahli waris dapat bersepakat melalui perdamaian.

Adapun pembagian harta waris adalah setelah harta peninggalan diambil hak-haknya untuk dikeluarkan:

1. Biaya penyelenggaraan jenazah atau *tajhiz*
2. Melunasi hutang
3. Melaksanakan wasiat¹

Idealnya, harta warisan dibagi setelah pemenuhan hak-hak mayit terpenuhi. Akan tetapi, dalam kondisi masyarakat sekarang ini banyak sekali yang menunda membagi warisan dengan alasan yang bermacam-macam. Padahal Allah telah mengancam orang – orang ini berdasarkan surat al-Nisa ayat 14

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artiya:

*“Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”*²

Fakta yang terjadi yang terjadi dalam masyarakat masih banyak yang belum melaksanakan kewarisan Islam sesuai hukum kewarisan Islam. Padahal salah satu prinsip dalam kewarisan Islam adalah *ijbari*, yaitu peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya

¹Muhibbin, Moh dan Wahid, Abdul, *Hukum Kewarisan Islam sebagai pembaruan hukum positif di Indonesia*, Jakarta, Sinar grafika, 2009, hal. 51

²Departemen agama RI, *Alqur'an dan terjemahannya*, Menara Kudus, Kudus, 2006, hal.79

menurut Allah tanpa kehendak pewaris ataupun permintaan ahli warisnya.³ Hal ini dapat mengakibatkan pertengkaran antara ahli waris dalam pembagian waris.

Misalnya pembagian waris di Palangka raya seperti dialami oleh MN, pembagian harta 1000 hari (seribu hari) di tunda setelah meninggalnya pewaris sehingga yang sudah menjadi tradisi dikeluarga MN.⁴ Selanjutnya terjadi dalam sebagian masyarakat di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru pada keluarga Syamsudin yang terfokus pada acara adat istiadat seperti 40 hari, 100 hari, 1000 hari untuk mendo'akan para pewaris yang meninggal dan menunda pembagian waris karena mereka berfikir masih ada ibu (isteri pewaris) sehingga harta waris tersebut dipakai untuk membiayai nafkah ibu mereka.⁵

Selain itu, dalam masyarakat Bugelan pelaksanaan pembagian harta warisan banyak yang menggunakan hukum waris adat setempat yaitu cara pembagian warisan sesuai dengan kehendak masing-masing. Ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan melangsungkan pernikahan, harta bawaan masing-masing disatukan tanpa ada pemisahan. Seorang suami atau isteri meninggal terlebih dahulu, maka salah satu pihak yang hidup lebih lama akan memegang seluruh harta peninggalan untuk dimanfaatkan bersama-sama dengan ahli waris

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Kencana, 2004, Cet. 1, hal. 17

⁴ Akhyanoor, "Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Islam", Skripsi Sarjana (SI), Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, hal 3

⁵ AbdulKadir J.P, "Akibat Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta warisan Ditinjau Dalam Hukum Islam", Skripsi Sarjana Hukum Islam (SHI), Fakultas Syari'ah UIN Sultan Syarif kasim, hal 7

guna kelangsungan hidup keluarga pewaris. Dan pembagian harta waris tersebut setelah keduanya meninggal dunia.⁶

Selanjutnya, di Langsa provinsi Aceh masyarakat Muslim yang menunda dalam pembagian harta warisan. Seperti terjadi dalam keluarga Devi Armayani, salah satu ahli waris dari ayahnya yang sudah meninggal sejak tahun 2001. Ayahnya meninggalkan istri, seorang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan serta harta warisan berupa dua rumah. Rumah pertama adalah rumah warisan bawaan pewaris. Dan rumah kedua yaitu rumah yang dibangun oleh pewaris di tanah warisan milik istri pewaris. Rumah pertama telah disewakan sejak tahun 2011. Sedangkan anak istri pewaris tinggal di rumah kedua. Karena sebelumnya rumah pertama dikuasai oleh saudara pewaris. Di tahun 2015 anak pertama (Devi) menempati rumah pertama pewaris bersama suaminya. Sedangkan pewaris lainnya menempati rumah kedua. Dalam dua tahun Devi menempati rumah tersebut, sering terjadi pertengkaran. Anak laki-laki pewaris sering memaksa rumah yang ditempati Devi dijual supaya dia mendapatkan haknya. Pada bulan Januari 2018 rumah pertama itu disewakan kepada orang lain dan belum terjual. Hasil sewanya digunakan istri pewaris untuk biaya tambahan dalam memenuhi kebutuhan keluarga.⁷

⁶ Iyan Sofiyani, "Pelaksanaan Pembagian Waris Sampai Kedua Orang Tua Meninggal", Skripsi Sarjana (SI), Fakultas Syari'ah UIN Sunan Gunung Djati Bandung

⁷Lia Dahliani, Faisar Ananda, Ansari Yamamah, *Penundaan pembagian Warisan pada Masyarakat Muslim di Kota Langsa*, Tahkim, Vol.XIV, No.1, Juni 2018 hal.40

Selain itu, di Kalisari, Sayung Demak dalam melaksanakan hukum kewarisan Islam masih kurang, yang melaksanakan hanya sebagian masyarakat yang memahami hukum kewarisan Islam berdasarkan Alqur'an dan Hadis.⁸

Dalam hal ini, penyusun tertarik menganalisa pembagian harta warisan jika ditinjau dari pendapat ulama madzhab dan ulama kontemporer dengan menyusun skripsi yang berjudul **“ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI AHLI WARIS MENURUT PANDANGAN ULAMA MADZHAB DAN ULAMA KONTEMPORER”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Penjelasan umum tentang waris
2. Dasar hukum yang menjelaskan waris
3. Pendapat ulama madzhab dan ulama kontemporer tentang pembagian harta waris
4. Perbedaan pandangan ulama madzhab dan ulama kontemporer tentang pembagian harta waris

⁸ Arif Susanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Di Desa Kalisari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak*, Skripsi Sarjana (S1), Fakultas Syari'ah Universitas Sultan Agung Semarang

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah tersebut diatas, maka penulis akan lebih fokus pada bagaimana pandangan ulama madzhab dan ulama kontemporer tentang pembagian harta waris bagi ahli waris.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ulama madzhab dan ulama kontemporer tentang pembagian harta waris bagi ahli waris?
2. Apa perbedaan pandangan ulama madzhab dan ulama kontemporer tentang pembagian harta waris bagi ahli waris?

E. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah:

1. Untuk menguraikan pendapat ulama madzhab dan ulama kontemporer tentang pembagian harta waris bagi ahli waris.
2. Untuk menjelaskan perbedaan pendapat ulama madzhab dan ulama kontemporer tentang pembagian harta waris bagi ahli waris.

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Untuk pengembangan teori tentang pembagian harta waris bagi ahli waris menurut ulama madzhab dan ulama kontemporer.
2. Untuk mengetahui perbedaan pendapat ulama madzhab dan ulama kontemporer tentang pembagian harta waris bagi ahli waris.

F. Penegasan Istilah

Untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahpahaman terhadap orang lain dalam memahami permasalahan-permasalahan yang akan di bahas, maka penulis memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang dimuat didalam judul skripsi ini.

Adapun istilah-istilah yang dirasa perlu untuk diberikan penjelasannya oleh peneliti, yang di muat didalam skripsi yang berjudul “Analisis pembagian harta warisan bagi ahli waris menurut pandangan ulama madzhab dan ulama kontemporer” adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis berarti mengevaluasi, meneliti, mengkaji, menyelidiki.⁹ Analisis yang dimaksud adalah meneliti, mengkaji, membahas waktu pembagian harta warisan.

2. Pembagian

Menurut KBBI membagi berarti menceraikan (memecahkan, memisahkan, membelah) menjadi beberapa bagian yang sama.¹⁰

⁹Eko Endarmoko, *Tesamoko*, PT Gramedia pustaka Utama, Jakarta, 2016, hal.7

3. Harta warisan

Harta warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Dalam istilah *faraidh* didefinisikan sebagai *tirkah*, adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal baik berupa uang atau materi lainnya untuk diwariskan kepada ahli warisnya.¹¹

4. Ahli waris

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, yang mempunyai agama Islam dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris.¹²

5. Pandangan

Pandangan yang dimaksud adalah sebuah pendapat tokoh, ulama, kyai pada suatu masa.

6. Ulama madzhab

Ulama madzhab adalah ulama yang terkenal dengan empat madzhab diantaranya ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali.

7. Ulama kontemporer

Ulama kontemporer yang dimaksud adalah ulama-ulama pada masa sekarang. Ulama kontemporer diwakili oleh Yusuf Qardhawi, Sayid Sabiq, Wahbah Zuhaili, dan Quraish Shihab.

¹⁰Eko Endarmoko, *Tesamoko*, PT Gramedia pustaka Utama, Jakarta, 2016, hal.29

¹¹Maman Abdul Djalal, *Hukum Mawaris*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2006, hal.43

¹²Tim Redaksi nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, CV Nuansa Aulia, 2012, cet.3 hal.51

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang dipakai untuk mencari, menganalisis, merumuskan, mencatat, dalam menyusun laporan guna mencapai satu tujuan.¹³ Dalam proposal ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu meneliti atau mengkaji berbagai buku dan tulisan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti baik data primer ataupun sekunder.¹⁴ Penelitian yang sedang dibahas terkait dengan pembagian harta waris bagi ahli waris dengan melihat pendapat ulama madzhab dan ulama kontemporer serta perbedaan pendapat dari ulama madzhab dan ulama kontemporer.

2. Sumber Data

Sebagaimana judul, rumusan dan tujuan penelitian ini adalah Analisis pembagian harta waris bagi ahli waris menurut pandangan ulama madzhab dan ulama kontemporer maka jenis sumber data yang diperlukan adalah:

a. Data primer: sumber data primer merupakan data yang diperoleh sebagai data utama, yaitu sumber asli yang diperoleh secara langsung.¹⁵ Data yang bersangkutan dengan penelitian adalah pembagian waris menurut hukum waris Islam.

¹³Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara Pustaka, Jakarta, 1997,hal.1

¹⁴ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hal.35

¹⁵<http://www.mercubana.co.id>, (online) diakses pada 12- 11-2019

b. Data sekunder: sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁶ Sumber data sekunder diantaranya: buku-buku atau hasil-hasil penelitian dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi. Dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen dan sebagainya yang berkaitan dengan skripsi ini.¹⁷ Teknik dokumentasi dalam penelitian ini adalah mencari data yang berkaitan dengan ilmu waris dari buku, skripsi, jurnal dan lain-lain.

4. Analisis Data

Metode analisis data adalah proses memilah-milah data agar dikelola, dan dapat mengerti apa yang perlu dipelajari, serta dapat mengetahui apa yang bisa disebarkan kepada orang lain.¹⁸ Untuk mendapatkan hasil yang akurat dan sesuai dengan yang diinginkan penyusun, maka data yang telah didapatkan, kemudian dianalisis, dengan metode deskriptif analisis, yaitu dengan memilah-milah dan menemukan hal penting sesuai dengan tujuan penelitian kemudian menjabarkan dan menguraikannya dalam bentuk deskriptif yang tersusun secara sistematis.¹⁹

¹⁶Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta, cet ke 4, 2008, hal.225

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, PT Asdi Maha Satya, 2010, hal.273

¹⁸Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV.Jejak, Sukabumi, 2018, hal.183

¹⁹ Lexy.J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016, hal.248

Analisis data dalam penelitian ini adalah menganalisis ilmu waris dengan melihat pendapat ulama madzhab dan ulama kontemporer.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian ini, maka peneliti akan menyajikan sistematika penulisan yang terdiri dari masing-masing bab berisikan pembahasan yang berkesinambungan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS ISLAM

Dalam bab ini menguraikan tinjauan umum tentang waris mulai pengertian, dasar hukum waris, ahli waris, syarat dan rukun waris, sebab menerima warisan dan larangan menerima warisan, pemenuhan hak-hak pewaris terhadap harta waris, serta kajian teori relevan.

BAB III: PENDAPAT ULAMA MADZHAB DAN ULAMA KONTEMPORER TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI AHLI WARIS

Dalam bab ini berisi tentang pendapat ulama madzhab dan ulama kontemporer tentang pembagian harta warisan bagi ahli waris.

BAB IV: ANALISIS PENDAPAT ULAMA MADZHAB DAN ULAMA KONTEMPORER TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI AHLI WARIS

Analisis hasil penelitian yang dibahas dalam bab ketiga dengan kajian teori yang ada pada bab kedua.

BAB V: PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penulisan yang berisikan kesimpulan, saran dan penutup, dan dilanjutkan dengan daftar pustaka, daftar riwayat hidup serta lampiran-lampiran.